

**LAPORAN
KINERJA**

2021

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2021, di dalamnya memuat informasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang dalam menyelenggarakan Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah.

Kinerja Sekretariat Daerah diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah Tahun 2021.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target karena pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021, diharapkan dapat optimal

peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Sekretariat Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan Good Governance dan Clean Government.


SEKRETARIS DAERAH,
ERIK SETYO SANTOSO, ST., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730425 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Malang	2
I.2 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
II.1 Perencanaan Kinerja	5
II.2 Strategi dan Arah Kebijakan	6
II.3 Indikator Kinerja Utama	7
II.4 Perjanjian Kinerja	8
II.5 Standar Penilaian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1 Target dan Realisasi Kinerja	10
III.2 Realisasi dan Capaian Kinerja	11
III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Renstra	13
III.4 Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya	14
III.5 Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan	14
III.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya	15
III. 7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	17
III.8 Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra 5
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama 7
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja 8
Tabel III.1	Target dan Realisasi Kinerja 10
Tabel III.2	Realisasi dan Capaian Kinerja 11
Tabel III.3	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta 13
Tabel III.4	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya 14
Tabel III.6	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) 15
Tabel III.7.1	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 17
Tabel III.7.2	Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan 18
Tabel III.8	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021 20

B A B I

PENDAHULUAN

I.1 Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kota Malang

Sekretariat Daerah Kota Malang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, Sekretariat DPRD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.

Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Malang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan Staf Ahli;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- e. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
- f. penetapan dan pengendalian kebijakan di Sekretariat Daerah;
- g. pelaksanaan tugas selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;

- h. pelaksanaan tugas selaku pengelola Barang Milik Daerah;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Untuk mewujudkan pelayanan prima di era globalisasi dan kemajuan teknologi diperlukan sumber daya aparatur daerah yang mampu mengikuti kemajuan dengan meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu perencanaan strategis Sekretariat Daerah selalu menjadikan fenomena keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan maupun dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Adapun isu-isu strategis yang muncul dan perlu mendapatkan perhatian adalah, sebagai berikut:

- a. Belum terlaksananya pelayanan administrasi terpadu tingkat Kecamatan (PATEN);
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- c. Belum optimalnya kerja sama antar daerah, kerja sama daerah dengan Lembaga dan dengan pihak swasta;
- d. Belum optimalnya kualitas peraturan perundang-undangan daerah dan masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparatur di bidang hukum;
- e. Belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi khususnya dari komponen Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Kelembagaan serta Penataan Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
- f. Belum optimalnya penerapan SAKIP;
- g. Belum optimalnya pembangunan ekonomi yang terintegrasi;
- h. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian daerah dan kinerja BUMD;
- i. Belum optimalnya penatausahaan aset milik daerah di lingkup Sekretariat Daerah;

- j. Belum optimalnya fungsi kehumasan dan protokoler;
- k. Belum optimalnya kualitas kesejahteraan rakyat dan kehidupan beragama;
- l. Belum optimalnya kualitas penyerapan anggaran akibat keterlambatan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- m. Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah;
- n. Belum optimalnya perumusan kebijakan yang ditindaklanjuti.

I.2 Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,
mengoordinasikan :
Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
Bagian Kesra, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
Bagian Hukum, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
- 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan,
mengoordinasikan:
Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan SDA, terdiri atas Kelompok
Jabatan
fungsional;
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik; dan
Subbagian Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3. Asisten Administrasi Umum,
mengoordinasikan:
Bagian Umum, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;
Bagian Organisasi, terdiri atas Kelompok Jabatan fungsional;

Laporan Kinerja Setda Kota Malang 2020

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan,
- Subbagian Protokol; dan
Kelompok Jabatan Fungsional;

BAB II

Pereencanaan Kinerja

II.1 Perencanaan Kinerja

Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah di komponen laporan kinerja.

Tabel II.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2020 – 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran tahun ke			
				2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kualitas kelembagaan yang efektif penyelenggaraan pemerintah di komponen laporan kinerja	Nilai SAKIP Kota Malang			90.5	91	91,5	92
		Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	85%	90%	95%	100%
		Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	81,5	82	82,5	83
		Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13	13,05	13,1	13,15
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	20%	50%	75%	100%
		Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Persentase ketercapaian IKK	65%	70%	75%	80%
			Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	98%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,5	90,75	91	91,25

II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik;
- b. Peningkatan dan pemantapan koordinasi baik dengan Pemerintah maupun dengan Perangkat Daerah lain;
- c. Meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- d. Mendayagunakan dukungan dan komitmen dari Pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;
- e. Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan prasarana dan sarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
- f. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja Aparatur PNS;
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD);
- b. Penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tata kerja yang jelas;
- c. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik;
- d. Peningkatan kerjasama, koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat;
- e. Peningkatan dan pemantapan koordinasi antar perangkat daerah;

- f. Penyusunan produk hukum daerah yang kapabel dengan mengedepankan kepastian hukum, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
- g. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif;
- h. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- i. Peningkatan kualitas sistem dan kinerja pelayanan.

II.3 Indikator Kinerja Utama

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun			
			2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	85%	90%	95%	100%
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	81,5	82	82,5	83
3	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13	13,05	13,1	13,15
4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	20%	50%	75%	100%
5	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Persentase ketercapaian IKK	65%	70%	75%	80%
		Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	98%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,5	90,75	91	91,25

II.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2021 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang Tahun 2021 secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel II.4
Perjanjian Kinerja**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	90%	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4.189.705.000
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	82	Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	11.079.513.000
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.223.000
Meningkatnya Kematangan Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	42	-	-
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai EKPPD	3	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	1.699.532.866

Laporan Kinerja Setda Kota Malang 2020

	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	17.892.900.857
			Program Perekonomian dan Pembangunan	1.457.524.000
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	10.279.711.000
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.557.000.000

II.4 Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

110 Keatas	: Sangat tercapai/ sangat berhasil
$90 \leq X < 110$: Tercapai/Berhasil
$60 \leq X < 90$: Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$X < 60$: Tidak tercapai/ Tidak terhasil

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

III.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2021 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2021

No.	Tujuan/sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	90%	97,55%	108,3%
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	82	82,69	100,8%
3	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13,05	12,85	98,4%
4	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Tingkat kematangan perangkat daerah	42	38,09%	90,6%
5	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah	Persentase ketercapaian IKK	65%	63,85%	98,2%
		Persentase ketercapaian SKM dengan predikat baik	98%	97,14%	99,12%
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,5	83,69	92,4%

Capaian kinerja dari seluruh target sasaran strategis mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 101,3%.

III.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023

Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2020-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Capaian Kinerja			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	94,58%	97,55%			111,2%	108,3%		
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	83,02	82,69			101,8%	100,8%		
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13,56	12,85			104,3%	98,4%		
Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Tingkat kematangan perangkat daerah	86,2%	38,09%			431%	90,6%		
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai EKPPD	63,85%	3,7			98,2%	123,3%		
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	97,14%	100%			99,12%	100%		
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	83,69	80,05			92,4%	88,2%		

Penjelasan Perbandingan realisasi tahun 2021 dengan realisasi tahun 2010 sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas produk hukum daerah dengan indikator persentase produk hukum yang telah ditetapkan pada tahun 2020 memiliki realisasi 94,58% mengalami kenaikan menjadi 97,55% pada tahun 2021.

2. Sasaran layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 83,02 mengalami penurunan menjadi 82,09 pada tahun 2021.
3. Sasaran Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja dengan indikator Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 13,56 mengalami penurunan menjadi sebesar 12,85 pada tahun 2021.
4. Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen ASN dengan indikator Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 86,20%, pada tahun 2021 mengalami perubahan sasaran menjadi meningkatnya kematangan perangkat daerah dengan indikator tingkat kematangan perangkat daerah yang memiliki realisasi 38,09 % dari target 42%.
5. Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan mengalami perubahan indikator yang semula indikator Persentase ketercapaian IKK menjadi Nilai EKPPD yaitu memiliki realisasi 3,7 dari target 3.
6. Sasaran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan dengan indikator Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 97,14% mengalami kenaikan sebesar 100 % pada tahun 2021.
7. Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 83,69% mengalami penurunan menjadi 80,05% pada tahun 2021.

III.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Sekretariat Daerah.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel III.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rencana Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	100%	94,58%	97,55%			
2	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	83%	83,02	82,69			
3	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13,15%	13,56	12,85			
4	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan	100%	86,2%				
	Meningkatnya kematangan perangkat daerah	Tingkat kematangan perangkat daerah	40%		38.09%			
5	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Presentase ketercapaian IKK	3	63,85%				
		Nilai EKPPD	3		3,7			
		Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	100%	97,14%	100%			
6	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	91,25%	83,69	80,05			

III.4 Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel III.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2021	2021	2021
1	2	2	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

III.5 Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2021 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Presentase produk hukum yang telah ditetapkan **(berhasil)** telah tercapai 97,55% sesuai dengan target yaitu 90%, dari 900 produk hukum yang telah ditetapkan dibanding 878 produk hukum yang diusulkan Perangkat Daerah.
2. Indikator Indeks kepuasan masyarakat layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan **(berhasil)** telah tercapai 82,69 sesuai dengan target yaitu 82.
3. Indikator Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP **(berhasil)** telah tercapai 12,85 dari target yaitu 13,05.
4. Indikator 4 Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan pada tahun 2021 mengalami perubahan menjadi tingkat kematangan perangkat daerah **(berhasil)** telah tercapai 38,09% dari target 42%

5. Indikator Persentase ketercapaian IKK pada tahun 2021 mengalami perubahan menjadi Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) (**sangat berhasil**) telah tercapai 3,7 dengan target 3.
6. Indikator Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik (**berhasil**) telah tercapai 100% dengan target 100%, dari 35 Perangkat Daerah , 35 Perangkat Daerah memiliki nilai SKM berpredikat baik.
7. Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah (**cukup berhasil**) telah tercapai 80,05 dari target 90,75.

III.6 Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel III.6
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp)			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	90%	97,55%	108,3 %	4.189.705.000	3.014.322.434	71,95%	150
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	82	82,69	100%	11.079.513.000	10.438.413.900	94,21%	106
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	13,05	12,85	98,4%	1.659.501.000	605.343.900	36,48%	269
Meningkatnya kematangan Perangkat Daerah	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	42	38.09%	90,6%				
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai EKPPD	3	3,7	123,3 %	1.703.267.000	1.492.051.295	88%	140
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	100 %	100%	100%	29.630.135.857	26.091.920.059	88%	113
Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	90,75	80,05	88,2%	67.557.000.000	58.051.488.619	85%	103

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1. Persentase produk hukum yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 108,3% dan capaian anggaran 71,95%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 50%.
2. Indikator Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 94,21%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 6%.
3. Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP dengan capaian kinerja 98,4% dan capaian anggaran 36,48%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 169%.
4. Indikator Persentase Standar Kompetensi yang diterapkan pada tahun 2021 mengalami perubahan menjadi tingkat kematangan perangkat daerah dengan capaian kinerja 90,6%.
5. Indikator Nilai EKPPD dengan capaian kinerja 123,3% dan capaian anggaran 88%%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 40%.
6. Indikator Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 88% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 13%.
7. Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah dengan capaian kinerja 88,2%% dan capaian anggaran 85%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3%.

III.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

**Tabel III.7.1
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Persentase produk hukum yang telah ditetapkan	108,3%	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Presentase pengembangan produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	101,8%	Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja	Nilai Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	104,3%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil survei internal organisasi	2,1	3,38	160%
Meningkatnya kematangan Perangkat Daerah	Tingkat kematangan perangkat daerah	90,6%	-	-			0%
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Nilai EKPPD	123,3%	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Presentase Ketercapaian IKK	75%	74%	98%
	Persentase ketercapaian IKM dengan predikat baik	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	100%	82%	82%
			Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase paket selesai tender	100%	93%	93,00%
			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	100%	100%	100%
Meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	88,2%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu nilai survei kepuasan internal presentase sarana dan sarana dalam kondisi baik	90,75	82,05	90%

Tabel III.7.2

Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

Program	Indikator Kinerja	Capaian	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Presentase pengembangan produk hukum yang ditindaklanjuti	100%	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Jumlah dokumen fasilitasi dan koordinasi hukum yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	16 dokumen	18 dokumen	112%
Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Persentase pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3 dokumen	3 dokumen	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Survei Internal Organisasi	160%	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan	3 dokumen	2 dokumen	66%
			Kegiatan Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kebijakan pengembangan kinerja dan pelayanan publik	18 dokumen	3 dokumen	16%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen LKJIP	100%	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen LKJIP	1 dokumen	1 dokumen	100%
Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Presentase ketercapaian IKK	98%	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	17 dokumen	11 dokumen	64%
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	20 dokumen	25 dokumen	125%
Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase kebijakan bidang perekonomian, infrastruktur dan SDA yang ditindaklanjuti	82%	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program Infrastruktur yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen pemantauan, evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan pelaksanaan program SDA yang difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Laporan Kinerja Setda Kota Malang 2020

Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase proses pengadaan yang dilaksanakan sesuai ketentuan	97,5%	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	Presentase paket selesai tender	100%	93%	93%
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	Persentase Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	100%	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	5 layanan	4 layanan	80,00%
Meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	88%	Penyusunan laporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	1 dokumen	1 dokumen	100%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	90%	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	nilai survei kepuasan internal		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	10 jenis layanan	10 jenis layanan	100%
	presentase sarana dan sarana dalam kondisi baik		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum sesuai ketentuan	6 jenis layanan	6 jenis layanan	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	19 jenis	19 jenis	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang di Sekretariat Daerah sesuai ketentuan	4 jenis layanan	4 jenis layanan	100%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipeliharaa sesuai ketentuan	16 jenis	16 jenis	100%
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah fasilitasi layanan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai ketentuan	2 jenis layanan	2 jenis layanan	100%
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah fasilitasi layanan kerumahtanggaan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan	20 jenis layanan	20 jenis layanan	100%

III.8 Realisasi Anggaran

Anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Capaian
		Anggaran	Realisasi	
sasaran	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah			
program	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4.189.705.000	3.014.322.434	72%
kegiatan	Fasilitasi dan koordinasi hukum	4.189.705.000	3.014.322.434	72%
sasaran	Meningkatnya layanan kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan			
program	Pengembangan Kebijakan Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan	11.079.513.000	10.438.413.900	94%
kegiatan	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.079.513.000	10.438.413.900	94%
sasaran	Meningkatnya pelaporan kinerja dalam mendukung akuntabilitas kinerja			
program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.332.246.000	1.315.436.100	98%
kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	66.245.400	66.245.400	100%
	Kegiatan Penataan Organisasi	1.266.000.600	1.249.190.700	98%
sasaran	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan			
program	Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	1.699.532.866	1.492.051.295	88%
kegiatan	Administrasi Tata Pemerintahan	1.470.591.000	1.307.663.694	88%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	228.941.866	184.387.601	80%
program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.734.134	1.545.300	41%
kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.734.134	1.545.300	41%
program	Program Perekonomian dan Pembangunan	17.892.900.857	14.261.336.562	79%
kegiatan	Pelaksanaan kebijakan perekonomian	1.214.559.300	78.814.862	6,5%
	Pelaksanaan administrasi pembangunan	30.000.000	23.490.200	78%
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	16.648.341.557	14.159.031.500	85%
program	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.457.524.000	1.359.550.086	93,3
kegiatan	Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Malang	1.457.524.000	1.359.550.086	93,3
program	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan	10.279.711.000	10.119.115.993	98,44

Laporan Kinerja Setda Kota Malang 2020

kegiatan	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10.279.711.000,00	10.119.115.993	98,44
sasaran	Meningkatnya kinerja pelayanan sekretariat daerah			
program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.557.000.000	58.051.488.619	85%
kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.445.857.192	24.053.838.108	84%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.961.000	78.778.000	57%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	9.258.109.439	8.497.710.501	91%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.942.321.000	8.164.846.650	91%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.864.928.762	7.368.596.160	83%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.925.130.300	6.992.027.360	88%
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	944.729.900	769.592.266	81%
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.039.962.407	2.126.099.574	69%

BAB IV

Penutup

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Malang berdasarkan suatu sistem akuntabilitas serta sebagai bahan dalam pengambilan keputusan ke arah perbaikan di masa yang akan datang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang pada tahun 2021 dengan 5 Program yang terdiri 20 kegiatan sebesar 101,3%.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kota Malang yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap Sasaran yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kota Malang pada Tahun Anggaran 2021.

Malang, Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



ERIK SETYO SANTOSO., ST., MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004